

## KEBIJAKAN, TUJUAN DAN VISI MISI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhamad Hasby Ashidiqi<sup>1)</sup>, Ubaid Ridlo<sup>2)</sup>, Maswani<sup>3)</sup>

Email: [muhamadhasbyashidiqi@gmail.com](mailto:muhamadhasbyashidiqi@gmail.com)

Magister Pendidikan Bahasa Arab

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### Abstrak (Indonesia)

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara terhadap rakyatnya. Pendidikan adalah cita-cita luhur yang telah digariskan sejak bangsa ini lahir. Dengan mengenyam pendidikan bangsa ini dapat berkontestasi dengan bangsa lain di dunia. Akan tetapi dalam realitasnya akses pendidikan dalam masyarakat belum merata seutuhnya. Masih terdapat daerah, terdepan terluar dan tertinggal yang membutuhkan banyak sentuhan pendidikan. Dibutuhkan pemerataan terhadap akses pendidikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama mengenyam pendidikan. Latar belakang tulisan ini adalah untuk membahas tentang (1) fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (3) Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Bagi Masyarakat. Kajian ini penting sebagai dasar arah pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dari berbagai perspektif tentang fungsi dan tujuan pendidikan telah jelas terlihat bahwa pendidikan di Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertaqwa kepada Tuhan serta memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat tentunya masyarakat akan sangat diuntungkan dalam hal birokrasi, sosial dan ketenagakerjaannya.

### Sejarah Artikel

Submitted: 7 Desember 2024

Accepted: 13 Desember 2024

Published: 14 Desember 2024

### Kata Kunci

Pendidikan, Tujuan, fungsi

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan sangat penting peranannya di dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan ada tiga macam yaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Masing-masing mempunyai fungsi dan strategi untuk melaksanakannya, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, yang tujuan institusi ini telah dirumuskan secara nasional, yang sarasannya adalah bagaimana tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tujuan dan Visi Misi Pendidikan Nasional

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi tonggak kemajuan peradaban suatu bangsa. Tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas tidak serta merta didapat begitu saja, terdapat peran negara yang menjadikan Tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas tidak serta merta didapat begitu saja, terdapat peran negara yang menjadikan pendidikan sebagai penentu keberhasilan kemajuan suatu bangsa.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.<sup>2</sup>

Pendidikan yang menghasilkan masyarakat berkualitas haruslah tersusun dari berbagai karakteristik dan keunikan yang ada pada masyarakat tersebut seperti letak geografis, potensi sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya yang dihadapi, dan keberagaman lainnya yang terdapat pada setiap daerah tempat masyarakat tersebut tinggal. Harapannya dengan Pendidikan yang merata di setiap daerah, masyarakat bisa terampil dalam menghadapi berbagai problem dan tantangan yang ada di masa depan.<sup>3</sup> Untuk memenuhi harapan tersebut, diantaranya diperlukan visi misi dan tujuan pendidikan nasional yang menjadi panduan untuk kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara. Interaksi sistemik antara pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, dan budaya global menunjukkan dinamika yang mendorong kemajuan peradaban bangsa.

#### Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 yaitu, Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) mempertimbangkan dengan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, sehat, cerdas berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mngendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan Tap MPRS No XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia pancasila sejati sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

---

<sup>1</sup> F N A Kurniawati, “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi,” dalam Jurnal AoEJ: Academy of Education Journal, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 11.

<sup>2</sup> Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> Putri Rizqiyah Rahmawati, “Analisis Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007” dalam Jurnal Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 2.

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia tersebut adalah: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan Pendidikan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.<sup>5</sup>

Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir dari setiap lembaga pendidikan dalam kerangka mewujudkan cita-cita konstitusional bangsa dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, produktif, mandiri, demokratis, dan berkepribadian Pancasila. Secara pedagogis, tujuan pendidikan nasional tersebut akan dicapai dengan memaknai pendidikan sebagai proses dan hasil pembudayaan dan pemberdayaan norma-norma Pancasila secara konsisten.<sup>6</sup>

## Visi Misi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional merupakan gambaran tentang wujud sistem pendidikan nasional yang ideal. Bangsa Indonesia yang multi etnis dan multi budaya yang tersebar dalam ribuan pulau (kepulauan) memerlukan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang mampu melayani kebutuhan akan pendidikan sebagai konsumsi dan investasi sumber daya manusia secara merata, bermutu, dan efisien dalam lingkungan kehidupan yang berubah dengan sangat cepat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya yang mengglobal.

Ki Hajar Dewantara melihat visi pendidikan nasional harus bersemangat keluhuran budi, mementingkan nilai budaya, pembentukan jiwa seutuhnya berbasis kekeluargaan. Sedangkan dalam konteks pendidikan sebagai organisasi, visi pendidikan merupakan organisasi sosial yang terbuka, yang sangat tergantung pada kebutuhan dunia lingkungannya, dan merupakan organisasi belajar (*learning organization*). Sebagai organisasi belajar, visi sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mencakup organisasi pendidikan pada tingkat nasional (organisasi makro), tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara regional (organisasi meso), dan pada tingkat satuan pendidikan (organisasi mikro).<sup>7</sup>

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi tahun 2025 bertujuan untuk menghasilkan individu Indonesia yang cerdas dan kompetitif, juga dikenal sebagai “insan kamil” atau “insan paripurna”. Visi ini tetap relevan dan perlu dipertahankan, dengan mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan dalam satu kerangka. Konsep individu Indonesia yang cerdas

---

<sup>4</sup> I Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”, dalam Jurnal Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 31.

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019, hlm. 163-164.

<sup>6</sup> Ibrahim Musa, “Paradigma Sistem Pendidikan Nasional”, Seminar Nasional Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan dan Pembelajaran, 2015, Hlm. 2.

<sup>7</sup> Ibrahim Musa, “Paradigma Sistem Pendidikan Nasional”, hlm. 3.

mencakup kecerdasan secara komprehensif, melibatkan dimensi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Cita-cita dalam pembangunan pendidikan menekankan pendidikan transformatif, di mana pendidikan menjadi pendorong perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu disertai dengan proses transformasi struktural, menandai perubahan menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal.

Visi dan misi pendidikan nasional telah dijabarkan dan termasuk dalam “penjelasan” Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Visi dan misi ini menjadi bagian integral dari strategi pembaruan sistem pendidikan.

## 1. Visi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional mengarah pada terwujudnya suatu sistem pendidikan sebagai pranata sosial, yang bertujuan untuk memberdayakan seluruh warga Indonesia agar menjadi individu yang memiliki keberagaman agama dan budaya, serta responsif terhadap tuntutan perubahan zaman.

## 2. Misi Pendidikan Nasional

Berdasarkan visi tersebut, misi pendidikan nasional mencakup :

- Upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk seluruh penduduk Indonesia.
- Pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan potensi anak bangsa dari usia dini hingga akhir hayat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang senantiasa belajar.
- Peningkatan kesiapan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai, dengan merujuk pada standar nasional dan global.
- Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip otonomi, sesuai dengan konteks negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

## B. Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional

Di antara banyak permasalahan pendidikan di Indonesia adalah tentang kesempatan pemerolehan pendidikan anak masih belum merata dan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu, serta masih banyaknya pembelajaran yang berorientasi pada keinginan orang tua bukan pada kebutuhan anak. Berangkat dari kondisi nyata pendidikan anak usia dini tersebut, untuk mengarah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, pemerintah telah mengeluarkan tiga pilar kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak usia dini dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014, dan sekarang pemerintah telah menyempurnakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam Kerangka Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 (Renstra terbaru).<sup>9</sup> Ketiga pilar tersebut adalah:

### 1. Perluasan dan Pemerataan Akses

---

<sup>8</sup> Jarkawi, Akib, Muhammad Yuliansyah, Manajemen Program Pendidikan, Yogyakarta: Suler Pustaka, 2024, hlm. 11.

<sup>9</sup> Laelatul Istiqomah, “Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud”, dalam Jurnal Golden Age, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 56.

Salah satu pilar pendidikan nasional adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang ditujukan dalam upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan dengan mengacu pada skala prioritas nasional yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang beraneka ragam baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis, maupun tingkat kemampuan intelektual, dan kondisi fisik. Perluasan dan pemerataan akses memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era saat ini.<sup>10</sup>

Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 arah pembangunan untuk RPJM ketiga yaitu dari 2005 sampai 2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.”<sup>11</sup>

Untuk itu maka dalam proses meningkatkan pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, peningkatan daya tampung instansi pendidikan. Kedua, peningkatan pemerataan pendidikan melalui peningkatan efektivitas afirmatif policy. Dapat juga dengan penyediaan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Ketiga, penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan.<sup>12</sup>

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi, dan Daya Saing

Pendidikan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu pendidikan perlu mendapat perhatian, baik dalam usaha pengembangan maupun peningkatan mutu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Institusi-institusi pendidikan perlu memikirkan apa kebutuhan masyarakat sehingga lulusannya mendapat tempat ditengah-tengah masyarakat dimana mereka berada. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, hal ini tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 yang berisikan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP):

- Standar Isi: Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik.
- Standar Proses: Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Standar Kompetensi Lulusan: Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

---

<sup>10</sup> Yayuk Zulaikah, Sokip, Asrop Safi'i, "Peningkatan Akses dan Pemerataan Potensi Lembaga Pendidikan Islam", dalam Jurnal Arjuna Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 64.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, 2007.

<sup>12</sup> Ahmad Syafi'i, "Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)", dalam Jurnal Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 201, hlm. 165.

- Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan: Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- Standar Sarana dan Prasarana: Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorum, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Standar Pengelolaan: Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- Standar Pembiayaan: Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
- Standar Penilaian Pendidikan: Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.<sup>13</sup>

Dari delapan standar nasional pendidikan satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan merupakan satu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda untuk mencapai satu tujuan yaitu meningkatkan mutu pendidikan.

### 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Tahap penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dalam artian bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjangkauan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran

Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan dalam memberdayakan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengelola diknas. Berfungsinya kedua kelembagaan tersebut secara optimal akan memperkuat pelaksanaan tatakelola prinsip good government dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan kapasitas juga akan terus dilakukan terhadap para pengurus sekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership menuju otonomi pengelolaan.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui:

- Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari;
- Pengawasan Masyarakat, pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi;
- Pengawasan Fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan;

Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.<sup>14</sup>

### C. Program-Program Pendidikan Nasional

Pendidikan sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia dewasa untuk menyiapkan generasi muda dengan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masa depan mereka. Proses pendidikan ini melibatkan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan terkait perilaku moral dan kecerdasan pikiran. Kihajar Dewantara, seperti yang dikutip oleh Aman, menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak didik.<sup>15</sup> Pendidikan nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki akar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, serta responsif terhadap tuntutan perubahan zaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPENAS) menyoroti tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang sudah dicapai. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bersaing dalam pasar kerja global. Dan ketiga, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, sistem pendidikan nasional diharapkan melakukan perubahan dan penyesuaian agar dapat mewujudkan pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan daerah, dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 mengacu pada nawacita dan visi 2025, dengan memperhatikan integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Visi tersebut adalah “terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Pencapaian insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat diartikan sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem, dengan penekanan khusus pada peran pelaku dalam suatu ekosistem, meskipun istilah “insan” sudah tercakup dalam konsep ekosistem.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lima misi utama, yaitu:

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat.

<sup>14</sup> Laelatul Istiqomah, “Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud”, hlm. 63.

<sup>15</sup> Dewantara, Ki Hajar. Pendidikan I: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977. cet.2. hal. 58

- b. Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu.
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa.
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai program pendidikan nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa **program pendidikan nasional** yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut:

#### 1. Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Wajib Belajar 12 Tahun (Wajarbel) bertujuan untuk memastikan setiap anak usia 7 hingga 18 tahun dapat memperoleh pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan wajib. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.<sup>16</sup>

#### 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berfokus pada pengembangan anak usia 0 hingga 6 tahun. Program ini berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan dasar, dengan mengoptimalkan perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik mereka.<sup>17</sup>

#### 3. Program Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi di Indonesia difokuskan pada pembekalan keterampilan teknis yang siap digunakan di dunia kerja. Melalui program **pendidikan vokasi**, pemerintah mengembangkan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** dan **perguruan tinggi vokasi** untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu, seperti teknik, kesehatan, dan perdagangan.<sup>18</sup>

#### 4. Program Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Gratis

Untuk mendukung implementasi program **Wajarbel**, pemerintah Indonesia menyediakan program pendidikan **gratis** di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga semua anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah.<sup>19</sup>

#### 5. Program Pendidikan Inklusif

Program **pendidikan inklusif** bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu fisik maupun mental. Program ini memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang layak di sekolah-sekolah umum dengan dukungan yang memadai.<sup>20</sup>

#### 6. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional*, 2020, hlm. 45.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Anak Usia Dini: Panduan Praktis untuk Orang Tua dan Pengajar*, Jakarta: Depdiknas, 2016, hlm. 32.

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Vokasi di Indonesia: Potensi dan Tantangan*, 2018, hlm. 60.

<sup>19</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kinerja Pendidikan Indonesia*, 2019, hlm. 120.

<sup>20</sup> S. M. Badruddin, *Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 78.



Program **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** memberikan dana bantuan langsung ke sekolah untuk mendukung biaya operasional pendidikan. Dana BOS digunakan untuk keperluan pembelian buku, alat belajar, serta biaya untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya.<sup>21</sup>

#### 7. Program Digitalisasi Pendidikan

Program **digitalisasi pendidikan** berfokus pada penerapan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ini termasuk penggunaan perangkat keras dan lunak, serta platform e-learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.<sup>22</sup>

### III. KESIMPULAN

Program-program pendidikan nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, upaya-upaya seperti **Wajarbel**, **pendidikan vokasi**, **pendidikan inklusif**, dan **digitalisasi pendidikan** diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh semua anak bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Santosa, *Kesenjangan Pendidikan Bahasa Asing di Daerah Tertinggal*, Bandung: Penerbit Saung Pustaka, 2018
- B. F. Hermawan, *Peningkatan Kualitas Guru Bahasa Asing di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Anak Usia Dini: Panduan Praktis untuk Orang Tua dan Pengajar*, Jakarta: Depdiknas, 2016
- Dewantara, Ki Hajar. Pendidikan I: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977. cet.2.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Digitalisasi dalam Pendidikan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Ditjen Dikti, 2021
- H. R. Amin, *Pengaruh Kebiasaan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Asing*, Jakarta: Penerbit Akademika, 2019
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Istiqomah, Laelatul, "Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud", dalam *Jurnal Golden Age*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Jarkawi, Akib, Muhammad Yuliansyah, *Manajemen Program Pendidikan*, Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2024.
- J. S. B. Siregar, *Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing*, Jakarta: Penerbit Media Utama, 2017
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kinerja Pendidikan Indonesia*, 2019
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program BOS*, 2020

---

<sup>21</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program BOS*, 2020, hlm. 45.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Digitalisasi dalam Pendidikan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Ditjen Dikti, 2021, hlm. 30.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Vokasi di Indonesia: Potensi dan Tantangan*, 2018
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional*, 2020
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Rencana Aksi Peningkatan Penguasaan Bahasa Asing*, 2021
- Kurniawati, F N A, “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi,” dalam Jurnal AoEJ: Academy of Education Journal, Vol. 13, No. 1, 2022.
- M. D. Irwanto, *Pendidikan Global dan Tantangan Era Digital*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020
- Musa, Ibrahim, “Paradigma Sistem Pendidikan Nasional”, Seminar Nasional Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan dan Pembelajaran, 2015.
- N. H. P. Prasetya, *Pentingnya Pembiasaan Bahasa Asing di Sekolah Dasar*, Yogyakarta: Penerbit Ilmu Pendidikan, 2021
- Rahmawati, Putri Rizqiyah, “Analisis Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007” dalam Jurnal Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2024.
- S. H. Tjahjono, *Penguasaan Bahasa Asing untuk Keunggulan Kompetitif dalam Dunia Kerja*, Surabaya: Penerbit Cendekia, 2019
- S. M. Badruddin, *Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Sujana, I Wayan Cong “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”, dalam Jurnal Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Syafi’i, Ahmad, “Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)”, dalam Jurnal Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, 2007.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Waruwu, Henoki “Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan”, dalam Jurnal Didaktik, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Zulaikah, Yayuk Sokip, Asrop Safi’I, “Peningkatan Akses dan Pemerataan Potensi Lembaga Pendidikan Islam”, dalam Jurnal Arjuna Vol. 2, No. 3, 2024.